



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PENGUMUMAN
NOMOR PG 3 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

I. UMUM

Dalam rangka memperoleh pejabat yang profesional, kompeten, handal dan akuntabel untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kementerian Perhubungan membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia, yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan.

II. JABATAN YANG LOWONG

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka saat ini adalah sebagai berikut :
 - A. Lingkungan Sekretariat Jenderal
 - Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (Eselon II.a);
 - B. Lingkungan Inspektorat Jenderal
 - Inspektur Investigasi (Eselon II.a).
 - C. Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
 - 1) Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Eselon II.a);
 - 2) Direktur Kepelabuhanan (Eselon II.a)
 - 3) Kepala Kantor Kesyahbandaraan Utama Belawan (Eselon II.a);
 - 4) Kepala Distrik Navigasi Kelas I Makassar (Eselon II.b);

5) Kepala Distrik Navigasi Kelas I Dumai (Eselon II.b).

D. Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

1) Direktur Keamanan Penerbangan (Eselon II.a);

2) Direktur Bandar Udara (Eselon II.a);

3) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Juanda Surabaya (Eselon II.b);

4) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama Juwata (Eselon II.b);

5) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Ngurah Rai Bali (Eselon II.b).

E. Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1) Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Eselon II.a);

2) Direktur Sarana Perkeretaapian (Eselon II.a);

3) Direktur Keselamatan Perkeretaapian (Eselon II.a).

F. Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara (Eselon II.a).

2. Persyaratan pendaftaran, deskripsi jabatan dan keterangan lainnya dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini;
3. Kelengkapan pendaftaran dapat diunduh dari *website* www.dephub.go.id dan melalui Website <http://selter-jpt.dephub.go.id/>.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2023



SEKRETARIS JENDERAL

Sebagai Ketua Panitia Seleksi,

NOVIE RIYANTO R.

NIP. 19661111 199503 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN PENGUMUMAN
NOMOR PG 3 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

I. DESKRIPSI JABATAN

A. LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jabatan Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, meliputi identifikasi, seleksi, penyiapan dokumen proyek potensial, analisis, penetapan sumber dan skema pembiayaan, transaksi, dan pengendalian pembiayaan, serta koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan usaha pembangunan sarana dan prasarana transportasi.

B. LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jabatan Inspektur Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Menteri Perhubungan dan/atau Inspektur Jenderal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

C. LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- 1. Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, meliputi penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan, penyiapan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan data dan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- 2. Jabatan Direktur Kepelabuhanan** mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

3. **Jabatan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan** mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan.
4. **Jabatan Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar** mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta kegiatan pengamatan laut, survei hidrografi, pemantauan alur dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran untuk area wilayah kerja kantor distrik navigasi Makassar.
5. **Jabatan Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai** mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta kegiatan pengamatan laut, survei hidrografi, pemantauan alur dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran untuk area wilayah kerja kantor distrik navigasi Dumai.

D. LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

1. **Jabatan Direktur Keamanan Penerbangan** mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan penerbangan, termasuk di bidang standardisasi dan kerja sama, personel dan penilaian risiko, fasilitas dan sertifikasi, kendali mutu, serta penyidik pegawai negeri sipil.
2. **Jabatan Direktur Bandar Udara** mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bandar udara, termasuk di bidang standardisasi keselamatan bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan pelayanan darurat bandar udara serta sistem penyelenggaraan dan pengusaha bandar udara.

- 3. Jabatan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Juanda Surabaya** mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara, yang meliputi keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara; terkait fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara; penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara; penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP); pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan; pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara; bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara; keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di bandar udara; dan pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continuous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*).
- 4. Jabatan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama Juwata** mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
- 5. Jabatan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Ngurah Rai Bali** mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara, yang meliputi keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara; terkait fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara; penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara; penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP); pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan; pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;

bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara; keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di bandar udara; dan pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan untuk pesawat udara bukan kategori transport atau bukan niaga.

E. LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

- 1. Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, meliputi perumusan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pengelolaan keuangan dan BMN serta pembinaan tata kelola BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pembentukan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian, pengelolaan sumber daya manusia, standar kompetensi jabatan, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan LHKPN dan LHKASN, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan sumber daya manusia serta pengadaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- 2. Jabatan Direktur Sarana Perkeretaapian** mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian.

3. **Jabatan Direktur Keselamatan Perkeretaapian** mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian yang meliputi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan data dan teknologi informasi, dan rumah tangga Direktorat.

F. LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jabatan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi udara, yang mencakup di bidang koordinasi program, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, pengujian sertifikasi profesi, penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan sertifikasi, standardisasi, akreditasi, serta rekomendasi pendirian lembaga pendidikan dan pelatihan.

II. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Persyaratan Umum

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Memiliki pangkat/golongan minimal Pembina Utama Muda (IV/c) atau sekurang-kurangnya pangkat Pembina Tk. I (IV/b) bagi pelamar untuk Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a;
- c. Memiliki pangkat/golongan minimal Pembina Tk. I (IV/b) atau sekurang-kurangnya pangkat Pembina (IV/a) bagi pelamar untuk Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.b;
- d. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana (S1) dan lebih baik telah lulus Strata-2 (S2) bidang terkait;
- f. Usia peserta maksimal **56 tahun** pada tanggal **27 Maret 2023**;
- g. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. Semua unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai Baik;
- i. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan;
- j. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- k. Tidak pernah memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik dan/atau organisasi terlarang;
- l. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. Telah menyampaikan LHKPN/LHKASN periode tahun 2021 dengan melampirkan bukti pelaporan.
- n. Telah menyerahkan SPT Tahunan (tahun 2021);
- o. Sehat jasmani dan rohani.
- p. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- yang ditujukan kepada Ketua Panitia seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Perhubungan;

2. Persyaratan Khusus

Memiliki rekam jejak pengalaman bekerja dengan organisasi sesuai bidang jabatan yang akan diduduki dalam bentuk *personal statement*.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman ditayangkan mulai tanggal **13 Januari 2023** website Kementerian Perhubungan www.dephub.go.id dan melalui Website <http://selter-jpt.dephub.go.id/>;
2. Pendaftaran hanya dilakukan secara *online* melalui website <http://selter-jpt.dephub.go.id/> mulai tanggal **13 s.d. 19 Januari 2023**;
3. Pelamar hanya diperbolehkan mendaftar paling banyak untuk 2 (dua) jabatan;
4. Pendaftar melakukan pendaftaran/registrasi awal secara *online* melalui website <http://selter-jpt.dephub.go.id/>;
5. Pendaftaran/registrasi lanjutan dilakukan setelah melakukan verifikasi *link* pendaftaran yang dikirimkan ke *email* peserta, dilanjutkan dengan cara *login* menggunakan *username* dan *password* yang telah didaftarkan;
6. Pelamar mengajukan surat lamaran untuk masing – masing jabatan yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 dan ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi. **Formulir Surat Lamaran dapat diunduh melalui website <http://selter-jpt.dephub.go.id/>**;
7. Surat lamaran dilengkapi dengan lampiran **scan** dokumen jelas yaitu:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Foto terbaru berwarna dengan Ukuran 3R;
 - c. SK Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - e. **SK pengangkatan dalam Jabatan** yang menunjukkan pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - f. SK Pertama kali pengangkatan dalam jabatan Administrator dan SK terakhir pengangkatan dalam jabatan Administrator atau SK Pertama kali pengangkatan dalam jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya dan SK terakhir pengangkatan dalam jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya;
 - g. Ijazah Diploma IV atau Strata 1 (S1) dan/atau Strata 2 (S2);

- h. **Sertifikat kelulusan Diklat** Kepemimpinan Tingkat III dan atau sertifikat kelulusan Diklat Fungsional Ahli Madya;
- i. Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian yang **ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000**;
- j. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/ Berat dari atasan langsung yang **ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000**;
- k. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- l. Surat Pernyataan Tidak pernah memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik dan/atau organisasi terlarang yang **ditanda tangani di atas Materai Rp. 10.000**;
- m. Bukti penyerahan/Tanda terima/bukti verifikasi pelaporan LHKPN/LHKASN tahun 2021 dari Instansi yang berwenang.
- n. Bukti Penerimaan Elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021
- o. Daftar Riwayat Hidup yang **ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000** yang **diunduh melalui website <http://selter-jpt.dephub.go.id/>**;
- p. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
- q. *Personal Statement* maksimal 600 (enam ratus) kata atau 2 (dua) halaman kertas ukuran A4 dengan menggunakan jenis huruf Arial, ukuran font 12, dan spasi 1.5.

Formulir lampiran dokumen Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan Surat Pernyataan di atas dapat diunduh melalui website <http://selter-jpt.dephub.go.id/>.

- 8. Seluruh berkas lamaran dan dokumen pendukung administrasi disampaikan kepada Panitia Seleksi melalui **unggah dokumen dalam website pendaftaran <http://selter-jpt.dephub.go.id/>**;
- 9. Batas waktu pendaftaran dan *upload* berkas lamaran selambat-lambatnya sampai dengan tanggal **19 Januari 2023 pukul 23.59 WIB**;
- 10. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
- 11. Informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran dan persyaratan dapat menghubungi Sekretariat Panitia dengan Nara Hubung melalui WA ke nomor 0813 8669 1606 pada jam kerja (Senin-Jum'at 08.30-16.30 WIB);

IV. JADWAL KEGIATAN

Tahapan proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Perhubungan dilaksanakan sebagaimana jadwal berikut ini:

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman	13 Januari 2023
2	Pendaftaran	13 s.d. 19 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	20 Januari s.d. 01 Februari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, Tema Makalah, dan Jadwal Assessment Serta Pelaksanaan Wawancara	03 Februari 2023
5	Pengumpulan Makalah	06 Februari 2023
6	Seleksi Kompetensi/Assesment Test (Tim Independent) dan Presentasi Program Kerja dan Wawancara Akhir (PANSEL)	07 Februari s.d 15 Maret 2023
7	Pengumuman 3 (Tiga) Besar	27 Maret 2023

V. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan Panitia Seleksi selama proses seleksi;
2. Dalam rangka seleksi ini tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan;
3. Berkas administrasi yang tidak memenuhi syarat atau tidak lolos seleksi administrasi tidak dikembalikan dan akan dimusnahkan setelah proses seleksi selesai;
4. Dalam seleksi ini **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN**;
5. Informasi dan jadwal kegiatan seleksi sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan perkembangan dan akan dinformasikan melalui Website <http://selter-jpt.dephub.go.id/>. kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi melalui website menjadi tanggung jawab pelamar;
6. Apabila dikemudian hari pelamar diketahui memberikan data/keterangan tidak benar, maka Kementerian Perhubungan berhak membatalkan hasil seleksi dan dapat melakukan penuntutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. Keputusan Panitia Seleksi bersifat Final dan tidak dapat diganggu gugat;

8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekhilafan dalam pengumuman ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 2023

SEKRETARIS JENDERAL
Selaku Ketua Panitia Seleksi,



Novie Riyanto R.
NOVIE RIYANTO R.
NIP. 19661111 199503 1 001